



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEWI PURWANTI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 687117

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 754.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 750 m2/100 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 9997 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah Seluas 2500 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
6. Tanah Seluas 1137 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 30000 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 405 m2/90 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 42.000.000**

1. MOTOR, KAWASAKI BLITZ R Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG GRAND EXTRA Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000



3. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z1 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 8.129.281

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 804.129.281

III. HUTANG

Rp. 24.263.904

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 779.865.377

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.